SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA: MUDARMAN NPM: 2005115058

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA 2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: MUDARMAN

NPM

: 2005115058

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

: PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU

DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 10

TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

DR. SYAIFUL BAKHRI, S.H., M.H.

AL FITRA, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/AK-XI/S1/1V/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: MUDARMAN

NPM

: 2005115058

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-**UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM** ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Skripsi ini telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 16 Oktober 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
JAKARTA RA	MAN
Dr. Dr. Drs. A.A.Oka Dhermawan, S.H., M.H.	
Dekan	
	0
Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.	1
Ketua Penguji	
	HPM and MANA
Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.	MAN II A LA L
Penguji I	
	/ X.
Indra Lubis, S.H., M.H.	\(\frac{1}{2}\)
Penguji II	

Motto:

"Jika Kau Mengidamkan Perdamaian. Tegakkan Keadilan"

Persembahan

Kepada: Ibunda terkasih, Istriku dan Anakanaku Tercinta yang Selalu
Memberikan Dukungan
dan Doa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "sebagai kelengkapan tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan Skripsi ini, dengan berbekal petunjuk, nasehat, dan bimbingan, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Untuk itu menjadi kewajiban bagi penulis dalam kesempatan ini menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

- 1. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- 2. Bapak DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- 3. Bapak DR. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang dengan bijak penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, nasehat dan bimbingan materi kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini;
- Bapak Al Fitra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis, yang dengan bijak penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan petunjuk, nasehat dan bimbingan teknis kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini;

- Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Universitas Bhayangkara Jakarta
 Raya yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses belajar mengajar;
- 6. Ibunda terkasih yang telah banyak memberikan peran dalam membentuk mental dan karakter jiwa penulis untuk selalu bekerja keras dalam menyelesaikan tugas penyusunan Skripsi ini;
- 7. Istri dan anak-anaku tercinta yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas penyusunan Skripsi ini;
- 8. Pimpinan/Atasan dan rekan-rekan Anggota Bareskrim Polri yang telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
- 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu kepada penulis penyusunan Skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan kepada semua pihak pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2009

Penulis

Mudarman

ABSTRAKSI

Mudarman, 2005115058, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Hukum yang menganut asas kedaulatan rakyat, disebut juga sebagai Negara demokrasi. Sebagai Negara demokrasi menjadi suatu keharusan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu dalam waktu tertentu yakni 5 (lima) tahun sekali. Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam konstusitusi Negara yakni dalam Pasal 22E ayat (2) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian untuk mengimplementasikan antara lain dibentuk Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan Undang-undang atau hukum administrasi yang memuat ketentuan pidana dalam rangka menopang agar kelemahan-kelemahan pada prinsip-prinsip hukum administrasi itu dapat ditegakkan melalui hukum pidana atau politik hukum pidana dalam hukum administrasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar peraturan perundangundangan dapat dilaksanakan dengan tertib. Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 terkandung semangat dan filosofi yang serba cepat dalam konteks penyelesaian perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu termasuk proses penyidikan yang dibatasi waktu yang singkat dan ketat, yaitu paling lama 14 (empat hari) hasil penyidikan berikut berkas perkara harus sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dari hasil penelitian di lapangan diperoleh suatu hasil bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan proses penyidikan perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu oleh penyidik Polri dirasakan belum optimal, sehingga supremasi hukum terutama asas keadilan dan asas kepastian hukum tidak dapat terwujud. Hal itu disebabkan adanya beberapa kelemahan dalam Undang -undang dimaksud serta tidak profesionalnya sebagian penyidik Polri yang diberi tugas untuk menyidik perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang menyangkut kemampuan, ketrampilan dan penguasaan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Pembimbing Materi: DR.Syaiful Bakhri, S.H., M.H. Pembimbing Teknis: Al Fitra, S.H., MH.

DAFTAR ISI

JUDUL D	ALA	M	i	
LEMBAF	R PEN	SETUJUAN SKRIPSIGESAHAN SKRIPSI	ii iii	
MOTTO -			iv	
KATA PI	ENGA	NTAR	v	
ABSTRA	KSI		vi	
DAFTAR	ISI		vii	
BAB I	PE	NDAHULUAN	1	
	A.	Latar Belakang 1		
	B.	Identifikasi dan Rumusan Masalah	8	
		1. Identifikasi Masalah	8	
		2. Rumusan Masalah	9	
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	9	
		1. Tujuan Penelitian	9	
		2. Manfaat Penelitian	10	
	D.	Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran	10	
		1. Kerangka Teoritis	10	
		2. Kerangka Konsepsional	16	
		3. Kerangka Pemikiran	20	
	E.	Metode Penelitian	21	
		1. Metode Pendekatan	21	
		2. Pengumpulan Data	22	
		3. Pengolahan dan Analisa Data	23	
BAB II	TIN	JAUAN PUSTAKA	24	
	A.	Pengertian	24	
		1 Danvidikan	24	

		2. Tindak Pidana 26
		3. Tindak Pidana Pemilu 28
	В.	Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di 30 Indonesia
	C.	Fungsi dan Peran Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut 34 Umum, dan Hakim Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>) 1. Penyidikan Kepolisian
	D.	Mekanisme Peradilan Perkara Tindak Pidana Pemilu 46 1. Penyidikan
	E.	Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) 55
BAB III	HA	SIL PENELITIAN 58
	А. В.	Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
BAB IV	PE	MBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN 80
	A.	Pembahasan 80
		 Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang- 80 Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD

		2. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	85
	B.	Analisa Hasil Penelitian	90
BAB V	KES	SIMPULAN DAN SARAN	96
	A.	Kesimpulan	96
	B.	Saran	98
DAFTAR I	PUST	'AKA	
LAMPIRA	N	ANS BHA	
RIWAYAT	HID	OUP PENULIS	
LEMBAR	KON	SULTAS <mark>I PEMBIMBING</mark>	